

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Kekuasaan merupakan realitas yang tidak pernah dapat dipisahkan dari kehidupan manusia, terutama dalam rana politik. Di setiap ruang sosial dan politik, kekuasaan hadir sebagai energi yang menentukan arah tindakan, pengambilan keputusan, dan pembentukan struktur masyarakat. Dalam kehidupan politik, kekuasaan tidak hanya dimaknai sebagai alat untuk memerintah, melainkan juga sebagai sarana untuk menata kehidupan bersama demi terwujudnya keadilan dan kesejahteraan. Menurut Foucault, kekuasaan bertujuan untuk membentuk individu yang disiplin agar menjadi lebih produktif.<sup>1</sup> Dalam pandangan etika sosial, kekuasaan sejati tidak terletak pada kemampuan untuk menguasai, tetapi pada kesediaan untuk melayani.<sup>2</sup> Karena itu, politik yang sehat semestinya menjadi sarana pelayanan publik yang berlandaskan moralitas dan tanggung jawab, bukan alat untuk memaksakan kehendak atau membeli dukungan.

Dalam praktik politik saat ini, kekuasaan sering disalahgunakan untuk mendapatkan dukungan dengan cara yang tidak etis, seperti memberikan sumbangan berupa material atau menjanjikan bantuan-bantuan lain demi

---

<sup>1</sup> Haryatmoko, *Etika Politik dan kekuasaan*, (Jakarta : Kompas, 2014), 243

<sup>2</sup> Ibid. 244

mendapatkan simpati politik. Fenomena ini dikenal sebagai politik transaksional, yaitu praktik pertukaran kepentingan di mana uang, barang, atau jasa dijadikan imbalan atas dukungan politik. Dalam penerapan praktiknya, Politik transaksional dilakukan dengan cara yang langsung maupun tidak langsung. Politik transaksional secara langsung itu dapat berupa sebuah pemberian dari tim sukses atau orang kepercayaan aktor politik terhadap masyarakat atau kelompok yang menjadi target. Sementara transaksi secara tidak langsung itu dapat berupa pembagian hadiah, sembako dan alat atau barang-barang lainnya.<sup>3</sup> Dalam praktik seperti ini, kekuasaan tidak lagi menjadi sarana pelayanan, tetapi berubah menjadi alat dominasi yang memperdagangkan nilai moral. Politik kehilangan roh etiknya, dan kekuasaan terdistorsi menjadi transaksi yang mengutamakan kepentingan pribadi atau kelompok di atas kesejahteraan bersama.

Demokrasi sejatinya memang tidak bisa dilepaskan dari proses-proses transaksi, yang artinya bahwa ada pertukaran dari satu pihak kepada pihak lainnya. Namun proses transaksi dalam demokrasi yang sehat, itu mengambil wujud pertukaran visi misi, ideologi, ataupun program kerja. jadi politik bukan ajang untuk memperebutkan kekuasaan dengan uang dan mereduksi demokrasi substansial menjadi sekedar demokrasi transaksional.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Ashar Pagala, *Politik Transaksional*, (Palembang, Bening Media Publishing, 2021), 15.

<sup>4</sup> Ashar Pagala, *Politik Transaksional*, 16.

Politik transaksional bukan sesuatu yang baru dalam sistem demokrasi Indonesia, tetapi merupakan sebuah warisan dari pemilihan tak langsung dan lahir ditengah-tengah masyarakat yang notabeneanya sangat bertentangan dengan regulasi baik undang- undang maupun agama. Gereja sebagai lembaga keagamaan yang memiliki posisi penting dalam struktur sosial masyarakat, tidak terlepas dari dinamika tersebut. Fakta menunjukkan bahwa dalam beberapa kasus, bantuan dari calon legislatif (caleg) kepada gereja sering kali disertai dengan harapan imbalan politik, seperti dukungan suara dari jemaat.

Data dari beberapa penelitian menunjukkan bahwa keterlibatan gereja dalam politik transaksional telah memengaruhi independensi gereja dalam mengambil sikap terhadap isu-isu sosial dan politik. Menurut Eka Darmaputera, gereja seharusnya menjaga jarak dari politik praktis agar tidak mencederai nilai-nilai spiritualitas yang dianutnya.<sup>5</sup> Namun, di sisi lain, fakta lapangan menunjukkan bahwa banyak juga jemaat yang justru memanfaatkan momen politik tersebut untuk memperoleh bantuan bagi gereja mereka. bahkan justru terkadang ada beberapa oknum pemimpin gereja serta anggota jemaat yang terlibat langsung dalam dinamika ini, baik sebagai pendukung maupun penerima bantuan.

---

<sup>5</sup> Eka Darmaputera, *Relasi Gereja dan Politik: Tinjauan Etis dan Teologis* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2002), 87.

Fenomena seperti ini, terjadi di Jemaat Ebenhaezer Pa'tondokan, klasis Sa'dan Ulusalu. Fenomena politik transaksional dalam jemaat ini tampak terlihat sebagai sesuatu yang wajar dan biasa saja. Bahkan tidak jarang setiap momen demokrasi, para caleg menggunakan kesempatan ini untuk menggunakan gereja sebagai tempat untuk mencari dukungan dengan iming-iming janji untuk memberikan bantuan. Dalam konteks ini, praktik politik transaksional tidak dilakukan secara langsung oleh calon legislatif, melainkan melalui orang kepercayaannya yang dikenal dekat dan berpengaruh di tengah jemaat dan masyarakat. Terkait hal ini, individu yang diberikan kepercayaan tersebut bertindak sebagai perwakilan dari oknum politik untuk menyampaikan pesan politik yang telah disamarkan dengan narasi kepedulian terhadap pelayanan gereja. Tawaran bantuan baik berupa barang maupun dukungan finansial untuk berbagai kegiatan gereja disebut sebagai ungkapan kerelaan atau empati terhadap pekerjaan dan pelayanan gereja. Terdengar seperti tidak ada yang salah, namun, dibalik tawaran-tawaran tersebut terdapat seruan bagi anggota jemaat untuk "bersatu dalam pilihan yang sama". Melalui hal ini, tampak bahwa apa yang seharusnya menjadi ungkapan iman, kerelaan dalam memberi bantuan justru berubah menjadi bentuk transaksi politik yang memanfaatkan relasi spiritual dan sosial.

Dari perspektif teologis, gereja seharusnya menjaga kemurnian spiritualitasnya, bertindak sebagai garam dan terang di tengah dunia ini, sebagaimana dijelaskan dalam Matius 5:13-16. Sayangnya, kini beberapa

pemimpin gereja dan anggota jemaatnya mulai setuju dan terlibat dalam praktik politik transaksional yang dilakukan dalam gereja. Akibatnya gereja dapat dipandang telah kehilangan perannya sebagai institusi yang seharusnya mengutamakan keadilan dan kebenaran. Dalam bukunya yang berjudul *Ethics*, Dietrich Bonhoeffer, menekankan pentingnya gereja tetap teguh pada prinsip-prinsip etika Kristen, menolak tunduk pada praktik politik yang bertentangan dengan ajaran Kristus.<sup>6</sup>

Dari sisi etika politik, ketika kepentingan politik dibawa ke dalam rana gereja, hal itu dapat dianggap sebagai bentuk kerusakan moral. Nilai-nilai keimanan yang seharusnya dijunjung tinggi justru digunakan untuk mengejar tujuan duniawi. Akibatnya, gereja menjadi seperti tempat pertukaran kepentingan, dan pelayanan yang seharusnya *matokko* atau sakral justru digunakan untuk membenarkan praktik tersebut. Tindakan semacam itu menunjukkan penyalahgunaan kekuasaan, karena gereja, yang seharusnya berfokus pada pembinaan spiritualitas, kini diarahkan untuk melayani kepentingan politik yang tidak sehat.<sup>7</sup>

Dalam konteks kehidupan jemaat Ebenhaezer Pa'tondokan, praktik politik transaksional seperti ini muncul akibat pengaruh kekuasaan yang sangat dominan dalam hubungan dengan anggota jemaat. Beberapa pemimpin gereja (anggota Majelis Gereja) atau anggota jemaat tertentu

---

<sup>6</sup> Dietrich Bonhoeffer, *Ethics* (New York: Simon & Schuster, 2005), 112.

<sup>7</sup> Muhtar Haboddin, *Memahami Kekuasaan Politik*, (Malang, UB Press, 2017), 5-7

memutuskan untuk mendukung calon legislatif atau mereka yang berkuasa, bukan semata-mata karena keyakinan politik pribadi, tetapi karena adanya tekanan dari hubungan kekuasaan yang telah lama terbentuk. Akibatnya, beberapa orang lain akhirnya setuju dengan langkah ini, baik karena merasa tidak enak untuk menolak, khawatir kehilangan relasi sosial yang baik, atau terpengaruh oleh tekanan moral dari orang-orang yang dianggap memiliki pengaruh besar. Ketika kita melihat konteks budaya Toraja, ini sangat sering terjadi di mana kekuasaan sering kali melekat pada mereka yang memiliki status sosial tinggi, kekuasaan ekonomi, atau yang memiliki peran penting dalam masyarakat. Struktur sosial ini membuat politik transaksional di lingkungan gereja semakin sulit dihindari, karena kekuasaan tidak hanya membentuk keputusan politik, tetapi juga cara berpikir dan bertindak.

Kita dapat memahami fenomena ini melalui konsep legitimasi kekuasaan, oleh Max Weber atau yang disebutnya sebagai dominasi yang sah. Menurut Weber, kekuasaan yang efektif tidak selalu didasarkan pada paksaan, melainkan pada pengakuan dan penerimaan dari mereka yang diperintah. Weber membedakan tiga jenis legitimasi kekuasaan, yaitu tradisional, karismatik, dan rasional-legal.<sup>8</sup> Jika kita melihat konteks Jemaat Ebenhaezer Pa'tondokan, yang paling menonjol adalah campuran antara legitimasi tradisional dan karismatik. Di sini, kekuasaan diterima karena rasa

---

<sup>8</sup>Muhtar Haboddin, *Memahami Kekuasaan Politik*, hlm. 25-28.

hormat terhadap status sosial, posisi dalam masyarakat, dan figur karismatik yang dianggap memiliki otoritas besar. Sayangnya, legitimasi ini pada akhirnya terdistorsi ketika digunakan untuk mempengaruhi pilihan politik dan mengeksploitasi kepercayaan anggota jemaat untuk keuntungan pribadi.

Kondisi tersebut memperlihatkan apa yang disebut Haryatmoko sebagai bentuk dominasi simbolik, yakni kekuasaan yang menundukkan tanpa kekerasan, tetapi melalui pembentukan kesadaran yang membuat masyarakat patuh tanpa menyadarinya.<sup>9</sup> Praktik ini berbahaya karena menyamarkan penyimpangan moral yang dibungkus kepedulian sosial dan pelayanan gereja. Bantuan yang tampak seperti solidaritas ternyata menjadi alat kontrol sosial yang membungkam integritas iman.

Penelitian ini juga melihat peran kepemimpinan gereja dalam membimbing jemaat Ebenhaezer Pa'tondokan menghadapi fenomena ini. John Maxwell menekankan bahwa pemimpin yang efektif harus memiliki integritas yang kuat dan mampu membimbing komunitasnya menuju tujuan yang benar.<sup>10</sup> Oleh karena itu, penting bagi pemimpin gereja untuk memiliki pemahaman yang mendalam tentang bahaya politik transaksional dan dampaknya terhadap spiritualitas jemaat.

---

<sup>9</sup>Haryatmoko, *Etika Politik dan kekuasaan*, (Jakarta : Kompas, 2014), 240.

<sup>10</sup>John Maxwell, *The 21 Irrefutable Laws of Leadership* (Nashville: Thomas Nelson, 1998),

Prinsip teologi kepemimpinan Kristen menegaskan bahwa pemimpin dipanggil untuk menjadi teladan dalam menjaga kemurnian pelayanan dan menolak segala bentuk penyalahgunaan kekuasaan. Kekuasaan dalam pandangan teologi Kristen semestinya dijalankan dalam semangat kasih dan tanggung jawab. Eka Darmaputera menegaskan bahwa kekuasaan yang benar adalah kekuasaan yang melayani, bukan yang mendominasi.<sup>11</sup> Sementara itu, Dietrich Bonhoeffer mengingatkan bahwa gereja tidak boleh diam terhadap penyalahgunaan kekuasaan, sebab ia dipanggil menjadi hati nurani dunia yang berani menegur ketidakbenaran.<sup>12</sup>

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan teologis dan sosiologis. Pendekatan teologis digunakan untuk menelaah aspek moral dan etis dari relasi kuasa yang muncul dalam praktik politik transaksional di gereja, serta menilai sejauh mana hal tersebut sejalan dengan nilai-nilai iman Kristen tentang keadilan, kebenaran, dan kesetiaan dalam pelayanan. Sementara itu, pendekatan sosiologis digunakan untuk memahami dinamika sosial jemaat, khususnya bagaimana struktur sosial, relasi antaranggota, dan pengaruh tokoh-tokoh berotoritas di Jemaat Ebenhaezer Pa'tondokan berperan dalam membentuk pola kepatuhan dan dukungan politik di lingkungan gereja. Melalui kombinasi kedua pendekatan ini, penelitian diharapkan mampu memberikan pemahaman yang

---

<sup>11</sup>Eka Darmaputera, *Relasi Gereja dan Politik: Tinjauan Etis dan Teologis*, 56

<sup>12</sup>Dietrich Bonhoeffer, *Ethics* (New York: Simon & Schuster, 2005), 112.

menyeluruh mengenai cara gereja menjaga integritas spiritualnya di tengah realitas sosial dan politik yang kompleks.

Beberapa penelitian sebelumnya memperlihatkan bahwa relasi kuasa dan politik transaksional merupakan fenomena yang meluas dalam masyarakat beragama di Indonesia. Haryatmoko (2010) menguraikan bagaimana kekuasaan kerap membungkus diri dalam simbol moral dan budaya untuk memperoleh legitimasi.<sup>13</sup> Studi lain oleh Silaban, berfokus pada relasi antara agama dan politik dalam konteks masyarakat Indonesia yang multikultural. Dalam artikelnya *Peran Gereja dalam Menjaga Integritas Pemilu di Indonesia*, Silaban mencatat bahwa gereja memiliki potensi untuk menjadi pengawas moral dalam pemilu.<sup>14</sup> Namun, ia juga mencatat bahwa posisi ini sering kali dikompromikan ketika gereja menerima bantuan material dari caleg.

Fenomena ini juga diamati oleh Widjaja, yang menyoroti bagaimana banyak gereja di daerah pedesaan menghadapi dilema antara menjaga independensi spiritual mereka dan menerima bantuan politik demi keberlanjutan fasilitas gereja.<sup>15</sup> Hal ini menunjukkan bahwa gereja memang tidak bisa sepenuhnya menghindari interaksi dengan dunia politik, tetapi yang menjadi permasalahan utama adalah sejauh mana para pemimpin gereja

---

<sup>13</sup>Haryatmoko, *Etika Politik dan kekuasaan*, (Jakarta : Kompas, 2014), hlm 240.

<sup>14</sup>Silaban, *Peran Gereja dalam Menjaga Integritas Pemilu di Indonesia* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2021), 88.

<sup>15</sup>Widjaja, T. (2021). *Kepemimpinan Gereja dan Tantangan Politik di Era Modern*. Yogyakarta: BPK Gunung Mulia,90

dan anggota jemaat dapat tetap menjaga integritasnya dalam situasi tersebut. Penelitian terdahulu juga menunjukkan bahwa politik transaksional dapat menciptakan perpecahan di dalam gereja. Misalnya, dalam studi oleh Saragih yang berjudul *Politik dan Fragmentasi di Gereja Lokal*, ditemukan bahwa perbedaan pandangan tentang penerimaan bantuan dari caleg sering kali menyebabkan konflik internal.<sup>16</sup> Meskipun penelitian-penelitian tersebut memberikan kontribusi penting, namun masih terdapat kekosongan dalam literatur terkait dengan relasi kuasa yang bermain dalam praktik politik transaksional di gereja-gereja tertentu seperti Jemaat Ebenhaizer Pa'tondokan. Penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan tersebut dengan memberikan fokus pada konteks lokal dan spesifik.

## **B. Rumusan Masalah**

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana sikap warga jemaat Ebenhaezer Pa'tondokan terhadap bantuan politik dan cara menyikapi praktik politik transaksional di gereja dalam perspektif teori kekuasaan Max Weber?
2. Bagaimana prinsip teologi kepemimpinan Kristen dapat menjadi pedoman bagi pemimpin gereja dan anggota jemaat dalam menghadapi dan menanggapi praktik politik transaksional tersebut?

---

<sup>16</sup> Saragih, *Politik dan Fragmentasi di Gereja Lokal* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2020), 102.

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Menganalisis sikap warga jemaat Ebenhaezer Pa'tondokan terhadap bantuan politik serta cara mereka menyikapi praktik politik transaksional di gereja dalam kerangka teori kekuasaan Max Weber.
2. Menggali prinsip teologi kepemimpinan Kristen sebagai landasan etis pedoman bagi pemimpin gereja dan anggota jemaat Ebenhaezer Pa'tondokan dalam menghadapi dan menanggapi praktik politik transaksional.

### **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kajian mengenai relasi kekuasaan dalam politik transaksional, khususnya dalam memperkaya perspektif akademik tentang dinamika kekuasaan dan relasi sosial dalam politik.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi gereja: Penelitian ini dapat menjadi bahan refleksi untuk menjaga integritas pelayanan dan membangun kesadaran jemaat terhadap bahaya politik transaksional.

- b. Bagi pemimpin Kristen: Memberikan panduan dalam mengambil sikap dan kebijakan yang bijaksana terhadap keterlibatan gereja dalam politik.
- c. Bagi peneliti lain: Sebagai referensi dan bahan dasar untuk penelitian lanjutan yang relevan dengan isu politik transaksional di gereja.

#### **F. Sistematika Penulisan**

Penulisan tesis ini terdiri dari lima bab dengan sistematika sebagai berikut:

##### **Bab I: Pendahuluan**

Bab ini berisi latar belakang masalah yang membahas tentang relasi kekuasaan yang terbangun dalam praktik politik transaksional yang terjadi dalam lingkup gereja Toraja jemaat Ebenhaezer Pa'tondokan, beberapa ulasan terkait penelitian yang juga membahas tentang kekuasaan, politik transaksional, rumusan masalah yang terdiri dari 2 poin yakni Bagaimana sikap warga jemaat Ebenhaezer Pa'tondokan terhadap bantuan politik dan cara menyikapi praktik politik transaksional di gereja dalam perspektif teori kekuasaan Max Weber? Dan bagaimana prinsip teologi kepemimpinan Kristen dapat menjadi pedoman bagi pemimpin gereja dan anggota jemaat dalam menghadapi dan menanggapi praktik politik transaksional. Setelah itu membahas tentang tujuan penelitian, untuk menjawab rumusan masalah tadi dan manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

**Bab II: Tinjauan Pustaka**

Bab ini mencakup tentang teori kekuasaan dari Max Weber, dan relasi kuasa dalam politik transaksional. Selain itu, pada bagian ini juga membahas tentang pandangan Alkitab tentang uang, politik dalam gereja, serta prinsip teologi kepemimpinan kristen dan teori calvin tentang Gereja.

**Bab III: Metode Penelitian**

Bab ini menjelaskan pendekatan dan jenis penelitian yang digunakan, yakni penelitian kualitatif dan alasan pemilihannya. Menunjukkan lokasi penelitian, jumlah informan dalam penelitian yakni 5 informan, teknik pengumpulan data seperti wawancara, observasi dan juga dibantu dengan literatur lainnya seperti dokumen, buku dan sebagainya. Pada bab ini juga akan membahas tentang teknik analisis data yakni dengan mereduksi data untuk mengidentifikasi informasi yang relevan, penyajian data dalam bentuk narasi dan teknik pengujian keabsahan data dengan menggunakan metode triangulasi data dan audit trail. Dibagian akhir juga ada rekapan rancangan jadwal penelitian yang akan dilaksanakan.

**Bab IV: Hasil dan Pembahasan**

Bab ini berisi tentang deskripsi hasil penelitian dan analisis penelitian. Pada bagian A tentang deskripsi hasil penelitian dibagi dalam empat poin pembahasan, yakni poin 1 mendeskripsikan tentang sikap terhadap relasi kuasa dalam politik transaksional, poin 2 mendeskripsikan tentang respon jemaat terhadap politik transaksional, poin 3 mendeskripsikan tentang politik

transaksional dari perspektif caleg, dan poin 4 mendeskripsikan tentang bentuk politik transaksional yang terjadi dalam gereja, jemaat Ebenhaezer Pa'tondokan. Sementara itu, bagian B dalam bab ini berisi tentang uraian analisis dari setiap hasil penelitian yang telah dideskripsikan pada bagian sebelumnya. Analisis dalam bagian ini dibagi dalam dua poin, yakni poin 1 analisis tentang sikap anggota jemaat dan anggota majelis gereja jemaat Ebenhaezer Pa'tondokan terhadap relasi kuasa, bagaimana pandangan kekristenan tentang hal ini, bagaimana kaitannya dengan teori dan juga dengan prinsip kepemimpinan kristen. Poin 2 juga demikian tentang respon terhadap politik transaksional. Bagaimana melihat politik transaksional dengan teori yang tercantum di bab 2, dan mengenai pandangan Alkitab tentang politik transaksional serta dampaknya pada prinsip kepemimpinan kristen.

#### **Bab V: Penutup**

Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran.